

LAPORAN EVALUASI RENCANA KERJA TW II
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026



BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Realisasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026 Triwulan II (Per 30 Juni 2026) pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2026 Triwulan Triwulan II merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran program/kegiatan berdasarkan realisasi DPA.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 8 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720710 199201 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	5
D. Metode Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9
BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DPA DAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	10
A. Perbandingan Jumlah Program Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau...	13
B. Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau...	13
C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau...	14
BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA	16
A. Capaian Target Indikator Sasaran	16
B. Capaian Target Indikator Program.....	17
C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan.....	19
BAB V KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	28
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	29
B. Rekomendasi.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	7
Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	9
Tabel 3.1 Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2026	10
Tabel 4.1 Pencapaian Target Indikator Sasaran Triwulan II	16
Tabel 4.2 Pencapaian Target Indikator Program Triwulan II.....	17
Tabel 4.3. Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II	19
Tabel 4.4 Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Triwulan II	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra). Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja di Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam Badan Pengelola Perbatasan Daerah dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana kesesuaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan dokumen Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disusun sebelumnya.

Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dicapai, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Badan Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Kepulauan

Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 894);

22. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 897);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 Nomor 1083);

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2026 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Evaluasi Hasil Renja Tahun 2026 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

D. Metode Evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Pada bagian ini memuat tentang metode evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing bidang.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi Renja ini adalah dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 1	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 2	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 3	Interval Nilai Evaluasi S/D TW 4	Status
1	22,5 % ≤ 100 %	45 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat tinggi (ST)
2	20 % ≤ 22,5 %	39 % ≤ 44 %	58 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3	17 % ≤ 19 %	33 % ≤ 38 %	50 % ≤ 57%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4	13 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Tabel 1. Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian target Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini berisi tentang uraian tujuan, sasaran dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi. Penyajian tujuan, sasaran dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1.	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	Persen	72,86%	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	50% 42,55% 34,48%

BAB III

PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM DAN SUB KEGIATAN DPA DAN RENJA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bab ini berisi tentang uraian perbandingan antara jumlah program, sub kegiatan dan anggaran DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1 Perbandingan DPA, Renja dan Renstra Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
5.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	√	√	√
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	√
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	√
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√	√	√
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	√	√	√
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	√	√	√
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	√	√	√
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	√	√	√

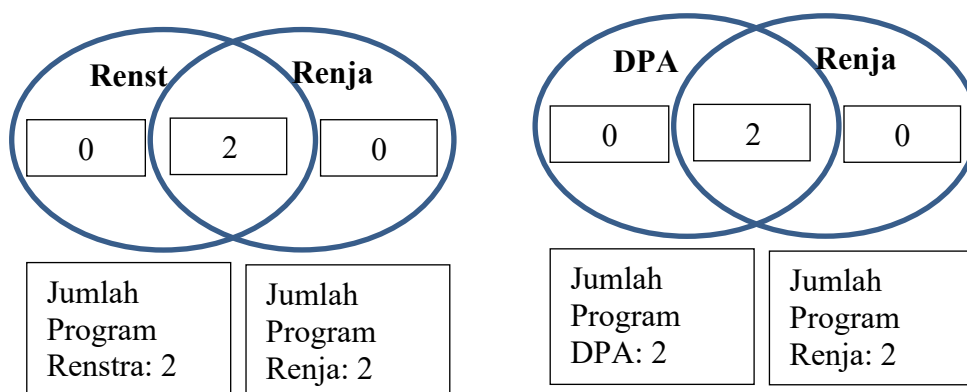
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	√	√	√
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	√
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	X	√	√
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	√
	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	X	√	√
	Pengadaan Mebel	X	√	√
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	X	√	√
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	√	√	√
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	√
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	X	√	√
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	√	√	√
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	√	√	√

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama	✓	✓	✓
	Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	✓	✓	✓
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	✓	✓	✓
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Fasilitas Penegakan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah	✓	✓	✓
	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	✓	✓	✓
	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	✓	✓	✓
	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	✓	✓	✓

A. Perbandingan Jumlah Program Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 1 berikut;

Flowchart 1: Perbandingan jumlah Program DPA, Renja dan Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026



Uraian penjelasan;

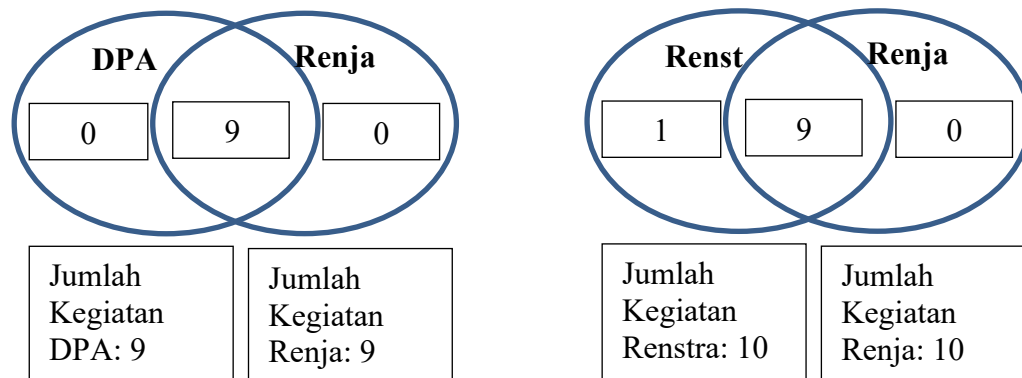
Jumlah Program yang dilaksanakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 sangat konsisten dimana jumlah program dalam Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sangat konsisten yaitu terdiri dari 2 (dua) Program yang sama baik nama program maupun jumlahnya. Merupakan implemementasi dari nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 beserta pemutakhirannya.

B. Perbandingan Jumlah Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Kegiatan dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 2 berikut;

Flowchart 2: Perbandingan jumlah Kegiatan DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026



Uraian penjelasan:

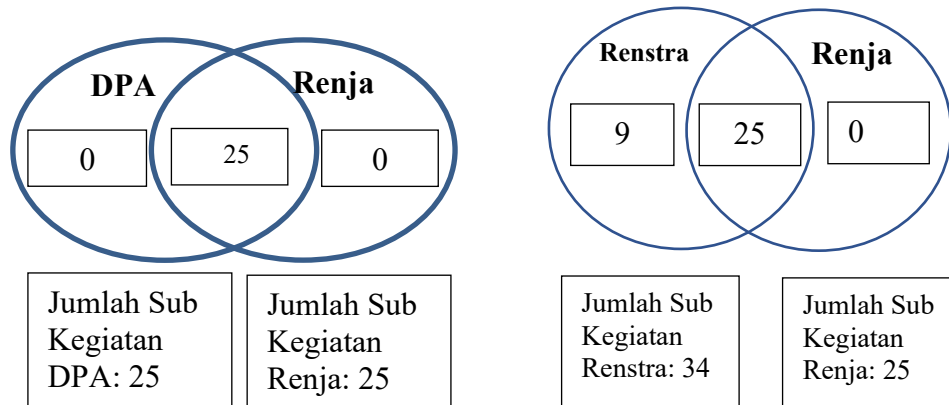
Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2026 terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang seluruhnya ada dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026 yang total kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026 terdapat 9 (sembilan) kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis OPD Irisan kegiatan dalam Renstra terdapat 10 (sepuluh), dan didalam renja juga terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang perlu dilaksanakan yang tercantum dalam Renstra.

C. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan Renstra, Renja dan DPA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada tahun 2026 dapat dilihat pada *flowchart* 3 berikut;

Flowchart 3: Perbandingan jumlah Sub Kegiatan DPA dan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026



Uraian penjelasan:

Dari *flowchart* di atas dapat digambarkan bahwa berdasarkan analisa dokumen dapat dijelaskan bahwa pada DPA tahun 2025 terdapat 25 (dua puluh lima) sub kegiatan tetapi dalam dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah terdapat 25 (dua puluh lima) sub kegiatan dikarenakan ada sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan.

Dokumen Rencana Kerja dan dokumen Rencana Strategis OPD Irisan sub kegiatan dalam Renstra terdapat 34 (tiga puluh empat), dan didalam renja juga ada 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang telah ditetapkan.

BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENJA

Bab ini berisi tentang data informasi dan uraian analisis capaian kinerja sasaran, program dan sub kegiatan renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

A. Capaian Target Indikator Sasaran

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sasaran Renja yang dievaluasi.

Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran Triwulan II
(Januari – Juni 2026)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)
	Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	%	72,86	12,73	17,47	Sangat Rendah

Triwulan I Tahun 2026 (data masuk sampai bulan Juni 2026) realisasi Indikator kinerja Sasaran yang berkategori kinerja/ status **Sangat Rendah (SR)** dengan presentase 12,73%. Capaian persentase kinerja sebesar 17,47% masih proses pencapaian target program yang direncanakan. Dimana rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara yang berupa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di 5 (lima) Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan Se-Provinsi Kepulauan Riau masih dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sehingga

capaian realiasi hanya 12,73% lebih rendah dari target 72,86% yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa Indikator kinerja program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target yang ditetapkan.

B. Capaian Target Indikator Program

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator Program Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja Program Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program Hingga Triwulan II
(Januari – Juni 2026)

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026	% Capaian Target 2026	Kategori Kinerja (Status)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peredikat	B	BB	78,25	ST
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah	Indeks	83	-	-	SR
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,5	90	110	ST
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	%	50%	35%	70%	ST

		Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	42,55%	37,5%	88,13%	ST
		Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	%	34,48%	10,91%	31,64%	R

Pada Triwulan II Tahun 2026 (data masuk sampai bulan juni 2026) Capain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator outcome terdiri dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) dimana target yang ditetapkan B terealisasi BB, Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia belum terealisasi dari target 83 yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (SR)** dan Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi 90 dari target yang ditetapkan sebesar 81,5% yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)**.

Sementara untuk Program Pengelola Perbatasan dimana indikator outcome yang ditetapkan terdiri dari Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota dengan target sebesar 50% dan terealisasi sebesar 35% yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)**, Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan ditetapkan target sebesar 42,55% diperoleh realiasi sebesar 37,5% yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** dan selanjutnya Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring dengan target 34,48% terealisasi sebesar 10,91% yang berkategori kinerja/ status **Rendah (R)**. capaian kinerja yang diperoleh belum maksimal sehingga belum mencapai target sasaran yang ditetapkan.

Sementara informasi dan analisis capaian realisasi anggaran program Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dievaluasi dapat dilihat dari tabel 4.3 berikut;

Tabel 4.3. Pencapaian Realisasi Anggaran Hingga Triwulan II (Januari – Juni 2026)

No	Nama Progam	Realisasi Anggaran	Status
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53,23%	ST
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	7,02%	SR

Pada Triwulan II Tahun 2026 (data masuk sampai bulan juni 2026) realisasi anggaran pada program yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu; pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan realisasi sebesar 53,23% atau Rp. 3.020.731.366,- dan Program Pengelola Perbatasan yang berkategori kinerja/ status **SR (Sangat Rendah)** dengan realisasi sebesar 7,02% atau Rp. 64.950.009,-

Semua Program yang telah direncanakan belum dapat terealisasi dengan baik dan masih proses mencapai target sasaran yang telah ditetapkan.

C. Capaian Target Indikator Sub Kegiatan

Bagian ini menyajikan data informasi dan analisis capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi. Capaian kinerja indikator sub kegiatan dan anggaran Renja yang dievaluasi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut;

Tabel 4.4
Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan Triwulan II
(Januari – Juni 2026)

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realis asi	Kinerja	Realisasi	
I	Program Pengelolaan Perbatasan	925.393.772	64.950.009	0	7,02	SR	SR	
1	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	814.622.935	33.665.730	0	4,13	SR	SR	
1.1	Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	799.991.869	33.665.730	0	4,21	SR	SR	
1.2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	14.631.066	0	0	0	SR	SR	
2	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	52.172.625	13.914.389	0	27	SR	R	
2.1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	15.322.111	5.346.727	0	34,90	SR	S	
2.2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	12.587.634	3.856.162	0	30,63	SR	R	
2.3	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	11.708.938	2.237.500	0	19,11	SR	SR	
2.4	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial	12.553.942	2.474.000	0	19,71	SR	SR	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan							
3	Monitoring dan Evaluasi	58.598.212	17.369.890	0	29,64	SR	R	
3.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	18.265.491	6.450.790	0	35,32	SR	S	
3.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	7.608.977	905.000	0	11,89	SR	SR	
3.3	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	32.723.744	10.014.100	0	30,60	SR	R	
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.674.477.711	3.020.731.366	27,65	53,23	S	ST	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.657.832	24.552.200	50	26,21	ST	ST	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.688.047	17.674.200	50	26	ST	R	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	67.969.785	6.878.000	25	26,78	SR	ST	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
2	Administrasi Keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	5.251.157.135	2.854.181.771	50	54,35	ST	ST	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.052.293.135	2.773.881.771	50	54,90	ST	ST	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.864.000	80.300.000	50	40,38	ST	T	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.020.618	0	0	0	SR	SR	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	28.020.618	0	0	0	SR	SR	
4	Administrasi Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	191.704.170	73.389.395	19,79	38,28	ST	ST	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.277.160	0	0	0	SR	SR	
4.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.551.204	1.613.271	25	7	SR	SR	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.790.621	14.154.193	33	43	S	T	
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.360.500	0	0	0	SR	SR	
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	-	-	-	-	-	-	
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.960.000	4.555.000	50	57	ST	ST	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
4.6	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.764.685	53.066.931	50	50,17	ST	ST	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	
5.2	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	
5.3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-	-	-	-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.417.956	46.620.000	50	92,47	ST	ST	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.213.836	0	50	0	ST	SR	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.389.648	0	50	0	ST	SR	
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.814.472	46.620.000	43,75	92,47	ST	ST	
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.520.000	21.988.000	50	36,94	ST	ST	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	52.800.000	21.988.000	25	36,94	ST	T	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Kategori Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2026		Ket
		DPA	Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinerja	Realisasi	
	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.720.000	0	0	0	SR	SR	
	Total	6.599.871.483	3.085.681.375	P 88,16 K SK 19,62	46,75	ST SR	ST	

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa;

1. Realisasi anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau TW II (Januari – Juni 2026) sebesar **Rp. 3.085.681.375,- atau 46,75%**.
2. Status pencapaian realisasi Kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026 realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu ada 10 (Sepuluh) terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Terdapat Sub Kegiatan yang berkategori kinerja/status **Sedang (S)** yaitu ada 1 (Satu), pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori kinerja/status **Sangat Rendah (SR)** yaitu ada 14 (Empat Belas), terdapat 5 (Lima) sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan terdapat 9 (sembilan) Sub kegiatan pada Program Pengelola Perbatasan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penegasan , Pemeliharaan, dan Pengamanan Wilayah Batas Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Realisasi anggaran kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2026 (Januari – Juni 2026) terdiri dari realisasi target indikator sub kegiatan yang berkategori kinerja/ status **Sangat Tinggi (ST)** yaitu ada 5 (Lima) terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori status **Tinggi (T)** yaitu ada 3 (Tiga) terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Sub Kegiatan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori status **Sedang (S)** yaitu ada 2 (dua), terdapat pada Program Pengelola Perbatasan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan,

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori status **Rendah (R)** yaitu ada 2 (dua), terdapat pada Program Pengelola Perbatasan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan, dan Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dan terdapat Sub Kegiatan yang berkategori status **Sangat Rendah (SR)** yaitu ada 13 (Tiga Belas), terdapat 8 (Delapan) Sub kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Dan terdapat 5 (lima) Sub kegiatan pada Program Pengelola Perbatasan, yaitu: Sub Kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Fasilitas Penegakan , Pemeliharaan, dan Pengamanan

Wilayah Batas Negara Pembangunan Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan, Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan.

BAB V

KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Data rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri RI masih dalam proses penyusunan (Draft Renaksi Pembangunan Kawasan Perbatasan)
2. Belum sinkronnya program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lintas instansi terkait
3. Sulitnya Perolehan Data rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan TA. 2026 pada Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota
4. Terdapat efesiensi anggaran sehingga kegiatan tidak maksimal

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2026 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Pada tahun 2026 ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) Program yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang didanai dari APBD pada Triwulan II tahun 2026 belum mencapai target, di mana perbandingan realisasi kinerja dan keuangan hingga Juni 2026 dengan capaian realisasi kinerja capaian Program 88,16% (Sangat Tinggi), Sub Kegiatan 19,62 (Sangat Rendah) dan realisasi keuangan mencapai **3.085.681.375,-** atau **46,75%** (Sangat Tinggi) dari pagu APBD yang dikelola sebesar **6.599.871.483,-**

Dari capaian realisasi tersebut, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Adapun beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- 1) Perlunya koordinasi dan konsolidasi antara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

- 2) Pimpinan agar melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan
- 3) Pemenuhan Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikianlah Laporan Evaluasi Hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026 ini dibuat dengan harapan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian pada triwulan berikutnya. Dengan dibuatnya laporan evaluasi hasil Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah ini diharapkan akan lebih memudahkan bagi pimpinan dan staf dalam mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan kedepannya.

Tanjungpinang, 8 Juli 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19720710 199201 1 003

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA-SKPD
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2026

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA-SKPD Tahun 2026 (%)	Kategori Kinerja dan Anggaran tahun 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	Unit SKPD Penanggungjawab	Ket
							I		II		III		IV								
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 13/8 x 100%	15 = 13/8 x 100%	16 = 13/8 x 100%	17	18				
	5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN			57.455.239.973	6.129.768.952	6.599.871.483	1.281.145.141	1.804.536.234				3.085.681.375	19,62	46,75		3.085.681.375	5,95	5,37		
	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			51.433.239.973	5.949.291.408	6.674.477.711	1.262.807.157	1.757.924.209				3.020.731.366	27,65	53,23		3.020.731.366	8,09	5,87		
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah (Prodiak)	85	83,16	83	0	95				95	114,46			95	111,76				
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	70	80	70		80				80	114,29			80	114,29				
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85	86,91	81,5	0	90				90	110,43			90	105,88				
	5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	2	2	0	1				1	50			1	10				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	20	4	4	1	0				1	25			1	5				
	5.06.01.1.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		715.000.000	94.837.700	67.969.785	-	17.674.200				17.674.200	50	26	R	17.674.200	10	2,47			
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	2	2	0	1				1	50		ST	1	10				
	5.06.01.1.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		365.000.000	48.512.679	25.688.047	6.878.000	-				6.878.000	25	26,78	R	6.878.000	5	1,88			
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		20	4	4	1	0				1	25		SR	1	5				
	5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		44.412.390.997	5.319.905.973	5.251.157.135	1.229.078.067	1.625.103.704				2.854.181.771	75	54,35		2.854.181.771	55	6,43			
		Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	27	14	27	27	27				27	100			27	100				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	3	3				6	50			6	10				
	5.06.01.1.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		43.217.841.124	5.139.971.973	5.052.293.135	1.229.078.067	1.544.803.704				2.773.881.771	100	54,9	ST	2.773.881.771	100	6,42			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	14	27	27	27				27	50		ST	27	100				
	5.06.01.1.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.194.549.873	179.934.000	198.864.000	-	80.300.000				80.300.000	50	40,38	T	80.300.000	10	6,72			
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	12	12	3	3				6	50		ST	6	10				
	5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		463.000.000	-	28.020.618	-	-				-	0	0		-	0	0			
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7	0	3	0	0				0	0			0	0				
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		24	0	8	0	0				0	0			0	0				
	5.06.01.1.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		360.000.000	-	28.020.618	-	-				-	0	0	SR	-	0	0			
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7	0	3	0	0				0	0		SR	0	0				
	5.06.01.1.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		103.000.000	-	-	-	-				-	0	0		-	0	0			
		Tertakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	24	0	8	0	0				0				0	0				
	5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.591.500.000	194.018.991	191.704.170	21.851.090	51.538.305				73.389.395	19,79	38,28		73.389.395	3,5	2,83			
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan/ Persentase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	0	1	0	0				0	0			0	0				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		11	0	2	0	0				0	0			0	0				
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		26	6	4	0	1				1	25			1	3,85				
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		24	3	3	0	1				1	33,33			1	4,17				
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		22	2	5	0	0				0	0			0	0				
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Paket)		60	12	12	0	0				0	0			0	0				
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		60	12	12	3	3				6	50			6	10				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60	12	12	3	3				6	50			6	10				
	5.06.01.1.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		70.000.000	-	-	-	-				-	0	0		-	0	0			
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	6	0	1	0	0				0	0			0	0				
	5.06.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		365.000.000	-	7.277.160	-	-				-	0	0	SR	-	0	0			

	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SR	0	0					
5.06.01.1.06.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			234.000.000		13.233.280		22.551.204	-		1.613.271				1.613.271	25	7,15	SR			1.613.271	3,85	0,69
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	26	6	4	0	1			1				1		25		SR	1			3,85	
5.06.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			233.000.000		25.793.736		32.790.621	-		14.154.193				14.154.193	33,33	43,17		T		14.154.193	4,17	6,07
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	24	3	3	0	1			1				1		33,33		S	1			4,17	
5.06.01.1.06.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			128.000.000		10.244.587		15.380.500	-		-				-	0	0		SR		-	0	0
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	22	2	5	0	0			0				0		0		SR	0			0	
5.06.01.1.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			113.000.000		16.500.000		-	-	-	-				-	0	0				-	0	0
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	12	12	0	0			0				0		0				0		0	
5.06.01.1.06.000	Penyediaan Fasilitas Tamu			107.000.000		8.255.000		7.960.000	-		4.555.000				4.555.000	50	57,22		ST		4.555.000	10	4,26
	Terlaksananya Fasilitas Tamu (Laporan)	Jumlah Laporan Fasilitas Tamu (Laporan)	60	12	12	3	3			6				6		50		ST	6			10	
5.06.01.1.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.341.500.000		119.992.388		105.764.685		21.851.090					53.066.931	50	50,17		ST		53.066.931	10	3,96
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	12	12	3	3			6				6		50		ST	6			10	
5.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.796.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				-	0	0
	Tersedianya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan (Dengan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0			0				0		0				0		0	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Paket)	2	0	0	0	0			0				0		0				0		0	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	0	1	0	0			0				0		0				0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	0	2	0	0			0				0		0				0		0	
5.06.01.1.07.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				-	0	0
	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0			0				0		0				0		0	
5.06.01.1.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			520.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				-	0	0
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	0	0	0	0			0				0		0				0		0	
5.06.01.1.07.000	Pengadaan Mebel			176.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				-	0	0
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	3	0	1	0	0			0				0		0				0		0	
5.06.01.1.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				-	0	0
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26	0	2	0	0			0				0		0				0		0	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			537.300.000		223.987.531		50.417.956	-		46.620.000				46.620.000	43,75	92,47				46.620.000	8,75	8,68
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Daerah yang dibutuhkan (Dengan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	12	12	3	3			6				6		50				6		10	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	0	12	3	3			6				6		50				6		10	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	3	3			6				6		50				6		10	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	3	0			3				3		25				3		5	
5.06.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.000.000		1.500.000		2.389.648	-		-				-	50	0		SR		-	10	0
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	12	12	3	3			6				6		50		ST	6			10	
5.06.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.300.000	-		1.213.836		-		-				-	50	0		SR		-	10	0
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	0	12	3	3			6				6		50		ST	6			10	
5.06.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			222.000.000		42.000.000		46.814.472	-		46.620.000				46.620.000	50	99,58		ST		46.620.000	10	21
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	3	3			6				6		50		ST	6			10	
5.06.01.1.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			295.000.000		180.487.531		-	-	-	-				-	25	0				-	5	0
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	12	12	3	0			3				3		25				3		5	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			553.048.976		68.028.534		59.520.000		5.000.000		16.988.000			21.988.000	25	36,94				21.988.000	4,76	3,98
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	0	2	0	1			1				1		50				1		14,29	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	1	0	0	0			0				0		0				0		0	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	5	5	0	0			0				0		0				0		0	
5.06.01.1.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			452.048.976			52.800.000		5.000.000		16.988.000				21.988.000	50	41,64		T		21.988.000	14,29	4,86
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	0	2	0	1			1				1		50		ST	1			14,29	
5.06.01.1.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan			60.000.000		66.794.300		-	-	-	-				-	0	0				-	0	0
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	1	0	0	0			0				0		0				0		0	

5.06.01.1.09.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			41.000.000		1.234.234		6.720.000		-		-				0	0		SR			-	0	0		
	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	22	1		5		0		0				0		0		SR		0		0				
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			6.022.000.000		180.477.544		925.393.772		18.337.984		46.612.025				64.950.009	0	7,02				64.950.009	0	1,08		Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yang dimunculkan	44,83		29,73		34,48		6		10,91			10,91		31,64					10,91		24,34			
		Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah/Kawasan	227,18		37,03		42,55		37		37,5			37,5		88,13					37,5		16,51			
		Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan	297		45,24		50		10		35			35		70					35		11,78			
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama			2.482.000.000		41.110.664		814.622.935		18.337.984		15.327.746				33.665.730	0	4,13				33.665.730	0	1,36		
	Tersusunnya Dokumen Fasilitas Penyelesaian Kerjasama, Rencana Aksi Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah (Dokumen)	5	1		1		0		0				0		0					0		0			
		Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	5		1		1		0		0			0		0					0		0			
5.06.02.1.01.000	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah			1.830.000.000		23.264.140		799.991.869		-		15.327.746				15.327.746	0	1,92		SR		15.327.746	0	0,84		
	Tertaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi	5	1		1		0		0				0		0			SR		0		0			
5.06.02.1.01.000.2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan			652.000.000		17.846.524		14.631.066		10.324.123,00		-			18.337.984	0	70,56		ST		18.337.984	0	2,81			
	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	5	1		1		0		0				0		0			SR		0		0			
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			2.000.000.000		79.913.090		52.172.625		-		13.914.389				13.914.389	0	26,67				13.914.389	0	0,7		
	Tersusunnya Dokumen Kawasan Perbatasan yang Dikembangkan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5	1		1		0		0				0		0					0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5		1		1		0		0			0		0					0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	5		1		1		0		0			0		0					0		0			
		Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona	5		1		1		0		0			0		0					0		0			
5.06.02.1.02.000.1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan			500.000.000		19.477.177		15.322.111		-		5.346.727				5.346.727	0	34,9		S		5.346.727	0	1,07		
	Tertaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	5	1		1		0		0				0		0			SR		0		0			
5.06.02.1.02.000.2	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan			500.000.000		20.496.166		12.587.634		-		3.856.162				3.856.162	0	30,63		R		3.856.162	0	0,77		
	Tertaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5	1		1		0		0				0		0			SR		0		0			
5.06.02.1.02.000.3	Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara			500.000.000		20.222.861		11.708.938		-		2.237.500				2.237.500	0	19,11		SR		2.237.500	0	0,45		
	Tertaksananya Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara (Dokumen)	5	1		1		0		0				0		0			ST		0		0			
5.06.02.1.02.000.4	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan			500.000.000		19.716.886		12.553.942		-		2.474.000				2.474.000	0	19,71		SR		2.474.000	0	0,49		
	Tertaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona	5	1		1		0		0				0		0			SR		0		0			
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi			1.540.000.000		59.453.790		58.598.212		-		17.369.890				17.369.890	0	29,64				17.369.890	0	1,13		
	Tersusunnya Dokumen Realisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan dalam pengembangan Kawasan Perbatasan (Dengan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Dokumen)	5	1		1		0		0				0		0					0		0			
		Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	25		5		5		0		0			0		0					0		0			
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah	25		5		5		0		0			0		0					0		0			
5.06.02.1.03.000.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			512.000.000		16.299.860		18.265.491		-		6.450.790				6.450.790	0	35,32		S		6.450.790	0	1,26		
	Tertaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	5	1		1		0		0				0		0			SR		0		0			
5.06.02.1.03.000.2	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan			498.000.000		12.573.350		7.608.977		-		905.000				905.000	0	11,89		SR		905.000	0	0,18		
	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Laporan)	25		5		5		0		0			0		0			SR		0		0			
5.06.02.1.03.000.3	Pengawasan Pelaksanaan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			530.000.000		30.580.580		32.723.744		-		10.014.100				10.014.100	0	30,6		R		10.014.100	0	1,89		
	Tertaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah	25		5		5		0		0			0		0			SR		0		0			
JUMLAH				57.455.239.973		6.129.768.952		6.599.871.483		1.281.145.141		1.804.536.234				3.085.681.375						3.085.681.375				

[illegible]